

PENGARUH DANA PERIMBANGAN DAN PENDAPATAN

ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP BELANJA MODAL

KOTA PALEMBANG



Skripsi Oleh :

ROMY MARTUA WICAKSONO

01071002085

EKONOMI PEMBANGUNAN

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih
Gelar Sarjana Ekonomi*

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

2014

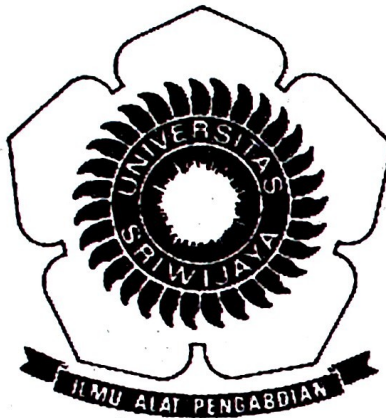
R-25801/26362

S
352.407
Rom
P
2014
C.141798

PENGARUH DANA PERIMBANGAN DAN PENDAPATAN

ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP BELANJA MODAL

KOTA PALEMBANG



Skripsi Oleh :

ROMY MARTUA WICAKSONO

01071002085

EKONOMI PEMBANGUNAN

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih
Gelar Sarjana Ekonomi*

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI**

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

PENGARUH DANA PERIMBANGAN DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP BELANJA MODAL KOTA PALEMBANG

Disusun oleh :

Nama : Romy Martua Wicaksono
NIM : 01071002085
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Bidang Kajian/Konsentrasi : Keuangan Daerah

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif

Tanggal Persetujuan

Tanggal,

04 April 2014

Tanggal,

20 Maret 2014

Dosen Pembimbing

Ketua



Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si.

NIP: 196812241993031003

Anggota



Dr. Rosmiyati.C.Saleh, M.Si.

NIP: 195605171985032001

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

PENGARUH DANA PERIMBANGAN DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP BELANJA MODAL KOTA PALEMBANG

Disusun oleh :

Nama : Romy Martua Wicaksono
NIM : 01071002085
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Bidang Kajian/Konsentrasi : Keuangan Daerah

Telah diuji dalam ujian komprehensif pada tanggal 8 April 2014 dan telah memenuhi syarat untuk diterima

Panitia Ujian Komprehensif
Inderalaya, 9 April 2014

Ketua



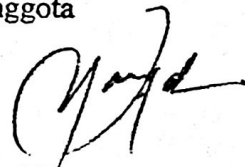
Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E. M. Si
NIP : 196812241993031003

Anggota



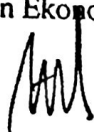
Dr. Rosmiyati C. Saleh, M. Si
NIP : 195605171985032001

Anggota



Drs. Nazeli Adnan, M. Si
NIP : 195804171988101002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan



Drs. Aswardi, S.E. M. Si
NIP : 196805181993031003

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Romy Martua Wicaksono

Nim : 01071002085

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Ekonomi Pembangunan

Konsentrasi : Keuangan Daerah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul :

“ Pengaruh Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal Kota Palembang “

Pembimbing :

Ketua : Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E, M. Si

Anggota : Dr. Rosmiyati Chodijah Saleh, M.Si

Tanggal Ujian : 8 April 2014

Adalah benar-benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan saya ini tidak benar dikemudian hari, saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaaan.

Palembang, 9 April 2014

Pembuat Pernyataan,



Handwritten signature of Romy Martua Wicaksono.

Romy Martua Wicaksono

NIM. 01071002085

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul: “ **Pengaruh Dana Perimbangan (DP) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal Kota Palembang** ”. Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Dalam skripsi ini dibahas mengenai, bagaimana pengaruh dana perimbangan (DP) dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap belanja modal Kota Palembang. Selama penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis tidak luput dari berbagai kendala. Kendala tersebut dapat diatasi berkat bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Prof.Dr. Taufiq Marwa, S.E, M.Si dan Ibu Dr. Rosmiyati Chodijah Saleh, M.Si yang telah mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk membimbing saya serta memberikan saran yang membangun dengan ilmu pengetahuan yang tak ternilai harganya dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Azwardi, SE, M.Si selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Nazeli Adnan, S.E, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
4. Para dosen penguji yang telah membantu memberikan kritik dan saran.
5. Kedua Orangtuaku dan adek-adekku, serta saudaraku yang telah memberikan saya kata-kata nasehat, inspirasi, motivasi, dan kata-kata semangatnya.

Inderalaya, 9 April 2014

Romy Martua Wicaksono

ABSTRAK

PENGARUH DANA PERIMBANGAN DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP BELANJA MODAL KOTA PALEMBANG

**Oleh:
Romy Martua Wicaksono**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah terhadap pengalokasian Belanja Modal Kota Palembang rentang waktu tahun 2004 sampai dengan 2012. Variabel dalam penelitian ini adalah Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah, sebagai variabel independen dan Belanja Modal sebagai variabel dependen. Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Kota Palembang, serta bacaan, buku, situs-situs internet, dan literatur yang turut membantu penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa secara parsial variabel Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengalokasian belanja modal di Kota Palembang, tidak signifikannya pengaruh dana perimbangan terhadap belanja modal diantaranya disebabkan karena dana perimbangan dipakai oleh pemerintah daerah berdasarkan kebutuhan daerah yang prioritas sehingga tidak selamanya dipakai untuk belanja modal dan kemungkinan belanja modal yang merupakan bagian dari belanja daerah diasumsikan terlalu kecil nilainya daripada Dana Perimbangan dan tidak signifikannya Pendapatan Asli Daerah mempengaruhi Belanja Modal diantaranya disebabkan karena pendapatan asli daerah tidak secara terus menerus dialokasikan ke jenis belanja modal, seperti pada penelitian ini realisasi anggaran belanja daerah Kota Palembang lebih besar direalisasikan terhadap belanja operasional daripada belanja modalnya.

Kata Kunci: Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Modal.

ABSTRACT

THE INFLUENCE OF THE INTERGOVERNMENTAL TRANSFER AND LOCAL REVENUES ON THE CAPITAL EXPENDITURE OF PALEMBANG CITY

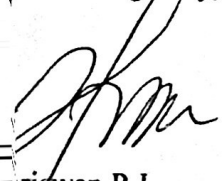
By

Romy Martua Wicaksono; Prof. Dr. Taufiq, S.E, M.Si; Dr. Rosmiyati C. Saleh, M.Si

This study is aimed at finding out the influence of the intergovernmental transfer and local revenues on the allocating of capital expenditure in Palembang city from 2004 to 2012. The intergovernmental transfer and local revenues are independent variables whereas the capital expenditure is the dependent one. The secondary data resource from the Palembang Central Statistics Agency, books, internet and other literatures are taken for this study. Multiple linear regression is used to analyze the data. The result of this research shows that there is no significant influence of the intergovernmental transfer and local revenues on the allocating of capital expenditure in Palembang city. This happens because intergovernmental transfer used by the local government is based on the local government's priority needs so that it is not frequently used by the government for the capital expenditure. It is also likely that the capital expenditure has been assumed to have smaller value than the intergovernmental transfer. Additionally, the local revenues have not always been allocated for capital expenditure. For example, the realization of the local budget plan of Palembang City has been mostly for the operating expenditure.

Keywords: *Intergovernmental Transfer, Local Revenues, and Capital Expenditure*

Acknowledged by,



Hariswan P.J

Instructor of English Training. Language Laboratory,

Wijaya University Graduate School

Email: hariswan@yahoo.com

RIWAYAT HIDUP



Nama : Romy Martua Wicaksono Pasaribu
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/Tanggal Lahir : Medan/12 Juni 1988
Agama : Kristen Protestan
Status : Belum Menikah
Alamat Rumah : Jl.Patuan Nagari, No.45 Pematang Siantar
Alamat Email : pasaribuloscules@yahoo.co.id

Pendidikan Formal :

Sekolah Dasar

: SD Budi Murni 2 Medan

SLTP

: SLTP Budi Murni 2 Medan

SMA

: SMA Swasta Santo Petrus Medan

Pendidikan Non Formal :

: Peserta pada acara dialog publik Jasa Raharja “Perspektif Besaran Santunan Jasa Raharja bagi Keluarga Korban Kecelakaan Lalu Lintas dan Alat Angkutan Penumpang Umum” yang diselenggarakan oleh Universitas Sriwijaya dan Jasa Raharja pada tanggal 12 Oktober 2011 di Pasca Sarjana UNSRI.

Pengalaman Organisasi :

1. Ketua Panitia Penyambutan Mahasiswa Baru Batak Timbangan, Indralaya 2009.
2. Pengurus Harian Punguan Mahasiswa Naimarata Unsri 2010.
3. Panitia Natal Batak Timbangan, Indralaya Tahun 2010-2011.

Penghargaan Prestasi :

-

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR LAMPIRAN.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Landasan Teori	12
2.1.1 Teori Transfer Pemerintah	12
2.1.2 Teori Pengeluaran Pemerintah	16
2.2 Dana Perimbangan	18
2.2.1 Dana Bagi Hasil	19
2.2.2 Dana Alokasi Umum	19
2.2.3 Dana Alokasi Khusus	21
2.3 Pendapatan Asli Daerah	22
2.4 Konsep Belanja Modal	25
2.5 Penelitian Terdahulu	27

2.6 Kerangka Pemikiran	29
2.7 Hipotesis Penelitian	30
BAB III METODE PENELITIAN	31
3.1 Ruang Lingkup Penelitian	31
3.2 Sumber Data	31
3.3 Defenisi Operasional Variabel Penelitian	31
3.4 Teknik Analisis Data.....	32
3.4.1 Teknik Analisis Deskriptif	32
3.4.2 Teknik Analisis Statistika Inferensial	33
3.5 Uji Ekonometrika	34
3.5.1 Uji Penyimpangan Klasik	34
3.5.1.1 Uji Multikolinieritas	34
3.5.1.2 Uji Heterokedastisitas	34
3.5.1.3 Uji Normalitas	34
3.5.1.4 Autokorelasi	35
3.5.2 Uji Statistik	35
3.5.2.1 Koefisien Korelasi (R) dan Determinasi (R ²)	35
3.5.2.2 Uji F Statistik	36
3.5.2.3 Uji T Statistik	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
4.1 Gambaran Umum Kota Palembang	38
4.1.1 Pemerintahan Kota Palembang	39
4.1.1.1 Pemerintah	41
4.1.2 Gambaran Perekonomian Kota Palembang	44
4.1.3 Struktur Ekonomi Kota Palembang	46

4.1.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi	48
4.1.5 Inflasi Sektoral	50
4.1.6 PDRB Perkapita Kota Palembang	51
4.1.7 Perkembangan Belanja Daerah di Kota Palembang	53
4.1.8 Perkembangan Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah di Kota Palembang	54
4.2 Hasil dan Pembahasan	56
4.2.1 Deskriptif Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah dan Analisa	56
4.2.2 Analisis Pengaruh Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal	58
4.2.2.1 Uji Penyimpangan Klasik	60
4.2.2.1.1 Multikolinieritas	60
4.2.2.1.2 Heterokedastisitas	61
4.2.2.1.3 Uji Normalitas	62
4.2.2.1.4 Autokorelasi	62
4.2.2.2 Uji Statistik	63
4.2.2.2.1 Uji Korelasi (R) dan Determinasi (R ²)	63
4.2.2.2.2 Uji F	63
4.2.2.2.3 Uji t	64
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	66
5.1. Kesimpulan	66
5.2 Saran	68

DAFTAR PUSTAKA 69

Lampiran-lampiran 73

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Perkembangan PAD, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal Kota Palembang tahun 2004-2012	6
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Per Kecamatan Kota Palembang tahun 2012	40
Tabel 4.2 Jumlah PNS berdasarkan Golongan	42
Tabel 4.3 Jumlah PNS berdasarkan Jabatan	43
Tabel 4.4 Jumlah PNS berdasarkan Pendidikan	44
Tabel 4.5 Produk Domestik Regional Bruto Kota Palembang Tahun 2012	45
Tabel 4.6 Persentase Struktur Ekonomi Kota Palembang menurut Sektor Primer, Sekunder dan Tersier tahun 2012	46
Tabel 4.7 Kontribusi PDRB Kota Palembang Tahun 2012	47
Tabel 4.8 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Palembang Tahun 2009-2012 (dalam persen)	49
Tabel 4.9 Laju Inflasi Kota Palembang dan Indonesia Tahun 200-2012 (dalam persen)	51
Tabel 4.10 Pendapatan Regional Perkapita Kota Palembang tahun 2005-2012 (dalam juta)	52

Tabel 4.11 Realisasi Anggaran Belanja Daerah Kota Palembang	
Tahun 2004-2012 (dalam juta rupiah)	53
Tabel 4.12 Perkembangan PAD dan Dana Perimbangan	
Kota Palembang Tahun 2004-2012 (dalam juta rupiah)	55
Tabel 4.13 Persentase Sumbangan perkembangan Indikator	
dana Perimbangan dari tahun 2004-2012	56
Tabel 4.14 Persentase Sumbangan Perkembangan Indikator	
Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2004-2012	57
Tabel 4.15 Hasil Estimasi Pengaruh DP dan PAD terhadap BM	58
Tabel 4.16 Hasil Uji Multikolinieritas	60
Tabel 4.17 Hasil Uji Autokorelasi	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Perkembangan dari PAD, Dana Perimbangan, Dana Belanja Modal Kota Palembang (dalam persen)	7
Gambar 4.1 Persentase Struktur Ekonomi Kota Palembang menurut Sektor Primer, sekunder dan Tersier (dengan migas) tahun 2012 (dalam persen)	48
Gambar 4.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Palembang tahun 2011-2012 (dalam persen)	50
Gambar 4.3 Uji Heterokedastisitas	61
Gambar 4.4 Uji Normalitas	62

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Data Perkembangan Dana Perimbangan Kota Palembang	73
Lampiran 2 Data Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang	74
Lampiran 3 Data Perkembangan Belanja Modal Kota Palembang	75
Lampiran 4 Uji Multikolinieritas	75
Lampiran 5 Uji Heterokedastisitas	76
Lampiran 6 Uji Normalitas	76
Lampiran 7 Uji Autokorelasi	77
Lampiran 8 Uji F	77
Lampiran 9 Uji Koefisien Regresi	78
Lampiran 10 Hasil Estimasi Pengaruh Dana perimbangan dan PAD terhadap Belanja Modal	78

BAB I

PENDAHULUAN



1.1. Latar Belakang Penelitian

Belanja Modal merupakan tolok ukur yang penting untuk menentukan tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah secara nyata dan bertanggung jawab. Otonomi daerah membawa dampak positif bagi daerah yang memiliki potensi sumber daya alam, tetapi tidak demikian dengan daerah yang miskin sumber daya alamnya, yang merupakan salah satu masalah yang dihadapi pemerintah daerah kabupaten/kota pada umumnya adalah terbatasnya dana yang berasal dari daerah sendiri (PAD), sehingga proses otonomi daerah belum bisa berjalan sebagaimana mestinya (*Azis, 1997*).

Peningkatan alokasi belanja modal dalam bentuk aset tetap seperti infrastruktur, peralatan dan infrastruktur sangat penting untuk meningkatkan produktivitas perekonomian karena semakin tinggi belanja modal semakin tinggi pula produktivitas perekonomian. Saragih (2003: 81) menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal yang produktif seperti untuk melakukan aktivitas pembangunan. Sejalan dengan pendapat tersebut, Stine (1994) dalam Darwanto dan Yustikasari (2006) menyatakan bahwa penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program – program pelayanan publik. Kedua pendapat ini menyiratkan pentingnya mengalokasikan belanja untuk berbagai kepentingan publik.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar mendefinisikan belanja modal sebagai pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah dimana aset tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja bukan untuk dijual.

Aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Untuk menambah aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Biasanya setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintah daerah sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial (Nugroho, 2009: 5).

Dengan bertambahnya kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah dan anggaran daerah yang semakin besar guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, maka perlu digali sumber-sumber penerimaan daerah. Sumber-sumber penerimaan daerah berasal dari daerah itu sendiri dan bantuan berupa transfer dari pemerintah pusat. Sumber pembiayaan utama atau dominan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, baik provinsi, kabupaten dan kota berasal dari kemandirian

daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sementara subsidi atau transfer dari tingkat Pemerintah Pusat berupa dana perimbangan merupakan sumber penerimaan pendukung atau tambahan saja. Oleh sebab itu jelaslah bahwa besarnya PAD menjadi salah satu indikator penting dari kewenangan keuangan. Kewenangan untuk memberdayakan sumber keuangan sendiri dilakukan dalam wadah PAD yang sumber utamanya adalah pajak daerah dan retribusi daerah (Sianipar, 2011: 1).

Otonomi daerah harus disadari sebagai suatu transformasi paradigma dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan di daerah, dimana Pemerintah Daerah memiliki otonomi yang lebih luas untuk mengelola sumber-sumber ekonomi daerah secara mandiri dan bertanggung jawab yang hasilnya diorientasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Transformasi paradigma dalam hal ini terlatak pada aspek akuntabilitas Pemerintah Daerah dalam rangka mengelalola sumber-sumber ekonomi yang semula bersifat akuntabilitas *vertikal* (kepada Pemerintah) menjadi akuntabilitas *horizontal* (kepada masyarakat di daerah) (Mardiasmo, 2002).

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Aziddin, 2012: 1). Hal tersebut sesuai dengan ketentuan umum di UU Otonomi Daerah No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah menggantikan UU No. 22 tahun 1999. Pelaksanaan kebijakan pemerintah Indonesia tentang otonomi daerah, dimulai secara efektif pada tanggal 1 Januari 2001, merupakan kebijakan yang

dipandang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi yang sesungguhnya. Desentralisasi sendiri mempunyai tujuan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan, dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dan antar daerah (Maimunah, 2006: 2).

Tujuan utama penyelenggaran otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (public service) dan memajukan perekonomian daerah. Dengan adanya otonomi daerah ini berarti Pemerintah Daerah dituntut untuk lebih mandiri, tak terkecuali juga mandiri dalam masalah finansial. Meski begitu Pemerintah Pusat tetap memberi dana bantuan yang berupa Dana Alokasi Umum (DAU) yang di transfer ke Pemerintah Daerah. Dalam praktiknya, transfer dari Pemerintah Pusat merupakan sumber pendanaan utama Pemerintah Daerah untuk membiayai operasional daerah, yang oleh Pemerintah Daerah "dilaporkan" di perhitungan anggaran (Rahmawati 2010 : 21). Pada akhirnya pemerintah akan melakukan transfer dana. Transfer dana ini berupa dana perimbangan. "Dana perimbangan adalah pengeluaran alokatif anggaran pemerintah pusat untuk pemerintah daerah yang ditujukan untuk keperluan pemerintah daerah" (www.ksap.org).

Dalam Undang-undang No.32 Tahun 2004 disebutkan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat akan mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Keempat komponen dalam dana perimbangan ini merupakan

satu kesatuan elemen sumber pembiayaan guna mendukung pelaksanaan penyelenggaraan kewenangan oleh daerah selain sumber keuangan yang sudah ada di daerah sendiri. Besaran dana perimbangan berbeda-beda di setiap daerah, tergantung pada potensi sumber-sumber dan kekayaan alam ataupun jumlah penduduk yang terdapat di daerah tersebut. Pada umumnya daerah yang PAD-nya masih rendah, lebih mengandalkan pada penerimaan dari dana perimbangan. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi, peningkatan PAD selalu diupayakan karena merupakan penerimaan dari usaha untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah. Peningkatan PAD harus berdampak pada perekonomian daerah (Maryati dalam Saragih, 2010: 69).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu unsur yang menentukan dalam pembangunan di daerah. Pengertian pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa "Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan".

Upaya-upaya untuk meningkatkan PAD ini tidak terlepas dari mekanisme sistem Pemerintah Daerah, yaitu kerjasama antara Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah, dengan cara pendekatan terpadu dengan tidak menghilangkan identitas, baik tugas dan fungsi masing-masing (Mahmudi, 2010: 18). Dalam mekanisme inilah yang akan menentukan besarnya belanja modal atau investasi yang akan dilakukan oleh suatu daerah.

Sebagaimana telah diuraikan terlebih dahulu bahwa pendapatan daerah dalam hal ini pendapatan asli daerah adalah salah satu sumber dana pembiayaan pembangunan daerah pada kenyataannya belum cukup memberikan sumbangan bagi pertumbuhan daerah, hal ini mengharuskan pemerintah daerah menggali dan meningkatkan pendapatan daerah terutama sumber pendapatan asli daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi (UU No.33 Tahun 2004). Dapat kita lihat dari perkembangan PAD dan Dana Perimbangan 9 tahun terakhir yaitu dari tahun 2004 sampai 2012. Hal ini ditunjukkan pada tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.1
Perkembangan PAD, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal
Kota Palembang Tahun 2004 – 2012 (Dalam Juta Rupiah)

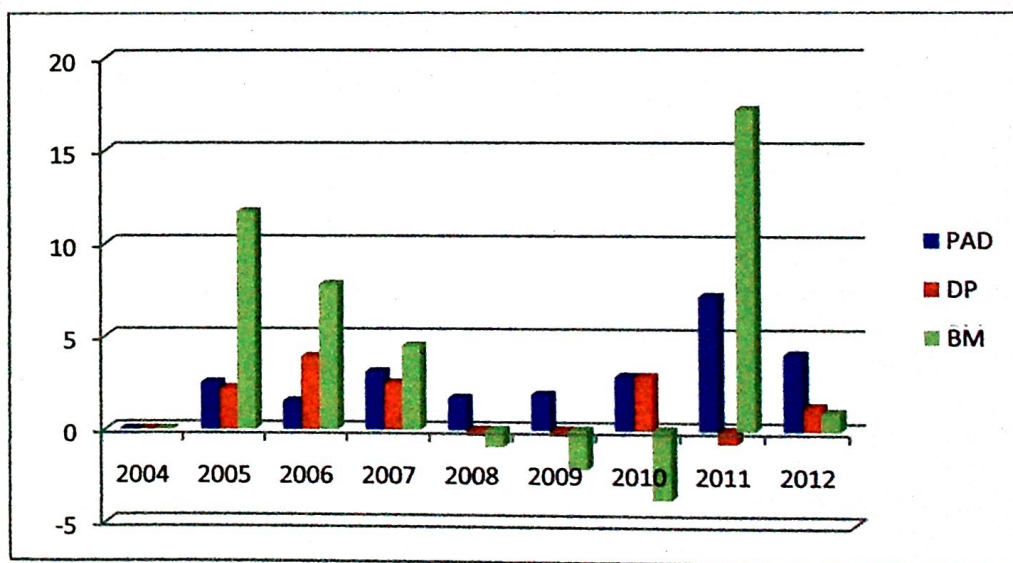
Tahun	Realisasi PAD (juta rupiah)	Pert (%)	Realisasi Dana Perimbangan (juta rupiah)	Pert (%)	Realisasi belanja Modal (juta rupiah)	Pert (%)
2004	61.586.324	-	452.727.901	-	52.145.280	-
2005	77.416.857	2,5	555.153.260	2,2	113.559.547	11,7
2006	89.676.046	1,5	772.951.769	3,9	202.695.239	7,8
2007	117.953.719	3,1	973.499.814	2,5	295.082.395	4,5
2008	139.154.073	1,7	939.914.612	-0,3	266.549.040	-0,9
2009	165.983.357	1,9	910.511.854	-0,3	209.303.087	-2,1
2010	214.540.736	2,9	1.177.289.944	2,9	131.606.634	-3,7
2011	369.364.078	7,2	1.093.095.598	-0,7	358.928.949	17,2
2012	521.132.742	4,1	1.243.859.361	1,3	397.764.000	1
Rata-rata	195.200.881,3	2,76	902.111.568,1	1,27	225.292.685,6	3,94

Sumber : Badan Pusat Statistik Palembang

Berdasarkan Tabel 1.1 perkembangan PAD terus meningkat dari tahun 2004-2012, ini berarti Pemerintah Kota Palembang sudah dapat menggali potensi fiskal daerahnya, begitu pun dengan perkembangan dana perimbangan. Jika kita lihat dari perkembangan dana perimbangan yang terus meningkat dari tahun 2004 sebesar Rp 452.727.901 dan pada tahun 2012 sebesar Rp 1.243.859.361, hal ini menunjukkan bagaimana ketergantungan Pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat masih sangat tinggi terhadap pembiayaan pembangunan yang mendukung bagi kelancaran aktivitas perekonomian suatu daerah.

Lebih jelas untuk perkembangan dari PAD, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal Kota Palembang, dapat kita lihat pada gambar 1.1.

Gambar 1.1 Grafik Perkembangan dari PAD, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal Kota Palembang (dalam persen)



Keterangan gambar :

PAD : Pendapatan Asli Daerah

DP : Dana Perimbangan

BM : Belanja Modal

Pada Gambar 1.1 memperlihatkan perkembangan PAD, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal yang mengalami peningkatan dari tahun 2004-2012. Jelas terlihat pada Gambar 1.1, dimana perkembangan dana perimbangan sangat besar, hal ini terlihat dari sebelum dan sesudah berlakunya otonomi daerah. Hal ini berarti pemerintah masih bergantung pada alokasi dari pusat untuk pembiayaan pembangunan. PAD Kota Palembang juga selalu mengalami kenaikan sepanjang tahun yang berarti pengelolaan dan pemanfaatan sektor-sektor perekonomian telah semakin optimal.

Sejalan dengan hal tersebut, Koswara (2000 : 5) menyatakan bahwa daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangannya sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar, yang didukung kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD khususnya pajak dan retribusi daerah menjadi bagian sumber keuangan terbesar. Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ada beberapa faktor yang perlu diberdayakan diantaranya adalah investasi dan PDRB perkapita. Salah satu investasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah ialah belanja modal yang digunakan untuk keperluan investasi jangka pendek, menengah, dan panjang.

Belanja modal adalah belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi (menambah aset). Belanja modal terdiri dari belanja tanah, jalan dan jembatan, bangunan air (irigasi), instalasi, jaringan, bangunan gedung, monumen, alat-alat angkutan, alat-alat bengkel, alat-alat pertanian, alat-alat kantor, alat-alat rumah tangga, alat-alat studio, alat-alat komunikasi, alat-alat kedokteran, alat-alat laboratorium, belanja modal buku/perpustakaan, barang bercorak kesenian dan budaya, belanja modal hewan ternak serta tanaman, belanja modal alat-alat persenjataan/keamanan (Septian, 2008: 18). Belanja modal memiliki karakteristik spesifik yang menunjukkan adanya berbagai pertimbangan dalam pengalokasiannya. Belanja modal yang dilakukan pemerintah daerah diantaranya pembangunan dan perbaikan sektor pendidikan, kesehatan, transportasi, sehingga masyarakat juga memiliki manfaat dari pembangunan daerah. Pemerintah daerah dapat mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD dengan menambah aset tetap. Dengan tersedianya infrastruktur yang baik diharapkan dapat menciptakan efisiensi dan efektivitas di berbagai sektor, sehingga produktivitas masyarakat semakin tinggi. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif. Saragih (2003: 81) menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya

dialokasikan untuk hal-hal produktif, misal untuk melakukan aktivitas pembangunan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membuat penelitian dengan judul: *"Pengaruh Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal Kota Palembang"*.

1.2. Perumusan Masalah

Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimanakah pengaruh Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal Kota Palembang .

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang telah dirumuskan di atas maka tujuan penelitian ini adalah mengetahui seberapa besar pengaruh Dana Perimbangan dan PAD terhadap Belanja Modal Kota Palembang.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan tambahan informasi, untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam bidang PAD, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal, yang nantinya akan berguna di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktik

Penelitian ini diharapkan nantinya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan referensi bagi Pemerintah Daerah Kota Palembang dalam mengambil kebijakan-kebijakan di bidang pembangunan daerah.

Daftar Pustaka

- Akram, Gio. 2013. Pengertian Kebijakan Fiskal.(online). Diambil pada tanggal 8 April 2014 dari <http://gioakram13.blogspot.com>
- Anggraeni, Unun Dian dkk.2010.*Analisis DAU dan PAD Terhadap Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Propinsi Jawa Tengah*.Jurnal Ekonomi, Solusi, Vol 9 No.1 Hal 69-81. Universitas Semarang.
- Astria, Sheilla A. 2012. *Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan*. Skripsi, Universitas Sriwijaya, Indralaya. (tidak dipublikasikan).
- Aziddin. 2012. *Pengaruh Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam terhadap Belanja Modal Kabupaten - Kota di Provinsi Sumatera Selatan*. Skripsi, Universitas Sriwijaya, Indralaya. (tidak dipublikasikan).
- Azis,1997. “ *Pendapatan Asli Daerah*” .Jakarta: Erlangga
- Badan Pusat Statistik Kota Palembang.2012. *Palembang dalam angka berbagaiedisi*. BPS. Palembang: BPS.
- Darwanto & Yulia Yustikasari. 2006. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*. Simposium Nasional AkuntansiX.
- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Halim, Abdul, 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Revisi, Salemba Empat,Jakarta.
- Harahap, Alfian H. 2009. “*Pengaruh Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara*”. Skripsi Sarjana. Fakultas Ekonomi USU: Medan.
- Jhingan, M.L. 2007.*Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Koswara. 2000. *Otonomi dan Pajak Daerah*. Penerbit PT Gramedia Widiasarana Indonesia. Yogyakarta.

- Kurniawan, Andreas dkk. 2011. *Intergovernmentals Grants : Indonesia And International Perspective. Jurnal Ekonomi*. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Maimunah, Mutiara. 2006. *Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatra*.
- Mardiasmo, 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit ANDI. Yogyakarta.
- Maryati, Ulfi & Endrawati. 2010. *Pengaruh PAD dan DAK Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Studi Kasus Sumatera Barat. Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, Vol 5 No. 2 Hal 160 – 176 . Universitas Sumatera Utara.
- Mentayani, Ida dkk. 2012. *Fly Paper Effect Pada DAU dan PAD Terhadap Belanja Daerah Pada Kota/Kabupaten Di Propinsi Kalimantan Selatan. Jurnal SPREAD* Volume 2 Nomor 1. STIE, Banjarmasin.
- Paujiah, Sri Puji. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Modal (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Tasikmalaya*. Jurnal Ekonomi, Universitas Siliwangi, Tasikmalaya.
- , Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.06/2007 Tentang *Bagan Akun Standar*.
- , Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 Tentang *Dana Perimbangan*.
- Pramukti, Eria Syahri. 2010. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Indonesia* (studi pada Pemerintah Kabupaten dan Kota yang melaporkan LKPD dari tahun 2004 – 2007 di website bpk ri). Skripsi, UNS Surakarta.
- Pratiwi, Novi. 2007. *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di Indonesia*. Skripsi, Fakultas Ekonomi UII: Yogyakarta. (dipublikasikan).
- Putro, Nugroho Suratno, 2009. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian*

Anggaran Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah. Skripsi, Universitas Diponegoro.

- Rahmawati, Nur Indah. 2010. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Alokasi Belanja Daerah. Skripsi, Universitas Diponegoro.
- Republik Indonesia. 2009. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*
- Republik Indonesia. 2004. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. *Tentang Pemerintah Daerah.*
- Republik Indonesia. 2004. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004. *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah.*
- Republik Indonesia. 2000. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000. *Tentang Pajak Daerah.*
- Saragih, Juli Panglima. 2003. Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi. Cetakan Pertama. Penerbit Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Septian, Gunawan Wahyudi. 2008. *Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah di Indonesia.* Skripsi. Yogyakarta: UII. Dipublikasikan.
- Setiyawati, Anis dan Ardi Hamzah. 2007. *Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK, Dan Belanja Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Vol. 4 No. 2 Hal.211-228.* Universitas Trunojoyo.
- Sianipar, Eva S.2011. "*Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Pengalokasian Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara*". Skripsi Sarjana. Fakultas Ekonomi USU: Medan.
- Sidik, Dr. Machfud dkk. 2002. *DAU Konsep, Hambatan, dan Prospek Di Era Otonomi Daerah.* Jakarta: Kompas.
- Simanjuntak, Gunawan. 2009. "*Pengaruh Transfer Pemerintah Pusat terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara*". Skripsi Sarjana. Fakultas Ekonomi USU: Medan.
- Supardi, Adi. 2012. *Pengaruh Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin.* Skripsi. Universitas Sriwijaya, Indralaya. (tidak dipublikasikan).

- Sukirno, Sadono. 2010. *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Edisi Ketiga. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Syafitri, Irma. 2009. "*Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara*". Skripsi Sarjana. Fakultas Ekonomi USU: Medan.
- Udjianto, Didit Welly. 2008. *Analisis Dana Perimbangan Antara Pusat dan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol 5. UPN, Yogyakarta.
- Wati, Endar Rosita & Subowo. 2010. *Hubungan antara PAD Dan Dana Perimbangan Dengan Belanja Modal Pemda Kudus*. *Jurnal Dinamika Akuntansi* Volume 2 Nomor 2. Universitas Negeri Semarang, Semarang.
- Yani, Ahmad. 2008. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Rajagrafindo Persada. Jakarta.